

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Kesenjangan merupakan suatu fenomena dimana terdapat ketidakseimbangan di dalam masyarakat yang mengakibatkan terjadinya perbedaan yang mencolok dalam suatu wilayah.<sup>2</sup> Atau dapat diambil kesimpulan bahwa kesenjangan merupakan suatu keadaan dimana di dalam suatu wilayah terdapat perbedaan kondisi sosial dimana masyarakat kaya memiliki kekayaan berlebih dan masyarakat miskin mengalami kondisi sangat kekurangan atau kesulitan ekonomi.<sup>3</sup> Kesenjangan yang terjadi di Indonesia merupakan masalah Nasional yang perlu mendapatkan penanganan khusus. Penanganan dalam hal pendidikan, pembangunan infrastruktur, pengentasan kemiskinan harus ditangani dengan strategi yang tepat dan cepat. Menurut Edyson kesejahteraan sosial dalam masyarakat akan dicapai dengan adanya pemerataan pendapatan oleh pemerintah negara.<sup>4</sup> Nilai kesenjangan yang terlalu besar sangat tidak baik,

---

<sup>2</sup>Hilmi Rahman Ibrahim, Potret Pertumbuhan Ekonomi, Kesenjangan dan Kemiskinan di Indonesia dalam Tinjauan Ekonomi Politik Pembangunan, *Jurnal Ilmu dan Budaya*, Vol. 40, No.55, Maret 2017, Hal.6314 diakses pada 27 Oktober 2020 Pukul 07:50 WIB

<sup>3</sup> *Ibid.*, hal. 6314

<sup>4</sup> Ahmad Soleh Sakni, Konsep Ekonomi Islam dalam Mengentaskan Kesenjangan Sosial: Studi Atas Wacana Filantropi Islam dalam Syari'at Wakaf, *JIA*, Vol 15, No 1, Juni 2013, hal. 152 diakses pada 27 Oktober 2020 Pukul 08:19 WIB

bahkan kesenjangan yang terlalu besar dapat merugikan, hal ini terjadi karena kesenjangan yang terlalu besar akan menghambat perekonomian jangka panjang. Selain itu kesenjangan yang lebar dapat membawa tantangan masyarakat yang kurang baik seperti kriminalitas, penggunaan narkoba, hingga berbagai penyakit seperti kanker dan jantung.<sup>5</sup>

Indonesia mengalami Tren peningkatan nilai Produk Domestik Bruto (PDB). Badan Pusat Statistik (BPS) dan Bank Indonesia (BI) mencatat PDB Indonesia atas harga konstan 2010 senilai Rp 8,16 ribu triliun pada tahun 2013. Dengan kenaikan rata-rata tahunan 5%, angkanya menjadi Rp 10,95 ribu triliun pada tahun 2019. Peningkatan tersebut menunjukkan Indonesia semakin sejahtera secara ekonomi. Tetapi, kesejahteraan tersebut ternyata belum mampu dinikmati seluruh rakyat. Ketimpangan ekonomi yang dalam masih terjadi di negeri ini. Berikut data rasio gini Indonesia periode 2011-2019

**Tabel 1.1**

**Tabel Kesenjangan di Indonesia Maret 2011 - September 2019**

Ratio Gini 2011-2019			
Tahun	Perkotaan	Pedesaan	Perkotaan+Pedesaan
2011 mar	0,422	0,340	0,410
2011 sep	0,396	0,329	0,388
2012 mar	0,425	0,330	0,410
2012 sep	0,425	0,327	0,413
2013 mar	0,431	0,320	0,413
2013 sep	0,424	0,324	0,406
2014 mar	0,428	0,319	0,406
2014 sep	0,433	0,336	0,414

<sup>5</sup> Mochamad Syawie, Kemiskinan dan Kesenjangan Social, *Informasi*, Vol. 16, No. 03 Tahun 2011, hal. 216, diakses pada 27 Oktober 2020 Pukul 07:59 WIB

2015 mar	0,428	0,334	0,408
2015 sep	0,419	0,329	0,402
2016 mar	0,410	0,327	0,397
2016 sep	0,409	0,316	0,394
2017 mar	0,407	0,320	0,393
2017 sep	0,404	0,320	0,391
2018 mar	0,401	0,324	0,389
2018 sep	0,391	0,319	0,384
2019 mar	0,392	0,317	0,382
2019 sep	0,391	0,315	0,380

Sumber : bps.go.id

BPS mencatat bahwa rasio gini di Indonesia berfluktuasi dari tahun ke tahun meski cenderung mengalami tren menurun. Angka ini dapat mengalami meningkat sewaktu-waktu ketika Indonesia tak siap dengan guncangan, seperti pandemi Covid-19. Kondisi tersebut memang tak banyak berpengaruh bagi kalangan atas, namun amat terasa bagi kalangan bawah. Masyarakat miskin akan semakin terpuruk, sedangkan yang rentan dengan mudahnya jatuh ke dalam kemiskinan.

Bank Dunia menjelaskan, ketimpangan ekonomi yang meningkat di Indonesia bukan karena memburuknya kondisi kemiskinan, namun melesatnya akumulasi kekayaan kelas atas. Antara 2003 dan 2010, konsumsi tahunan per orang dari 10% individu terkaya tumbuh hingga 6% setelah disesuaikan dengan inflasi. Tetapi konsumsi tahunan untuk 40% individu termiskin hanya tumbuh kurang dari 2%, seperti yang tertulis dalam laporan *A Perceived Divide: How Indonesians Perceive Inequality and What They Want Done About It*.

Bank Dunia juga menyebut ada empat faktor yang memperdalam ketimpangan ekonomi di Indonesia. Pertama, ketimpangan peluang sejak lahir. Anak yang lahir dari keluarga miskin cenderung memiliki masa depan kurang beruntung dibandingkan yang lahir dari keluarga kaya. Hal ini karena mereka tumbuh dalam ketidakadilan, sehingga mengurangi peluang untuk sejahtera. Dalam kondisi ini, sebagian ketimpangan terjadi lantaran faktor-faktor di luar kendali seseorang.

Dalam surveinya, Bank Dunia mendapati dua faktor utama yang menurut masyarakat membuat seseorang menjadi kaya. *Pertama*, karena faktor eksternal seperti latar belakang keluarga, koneksi, dan keberuntungan. Sebanyak 45% responden yang menyatakannya. *Kedua*, karena faktor internal seperti kerja keras. Sebanyak 46% masyarakat yang menyatakannya. Meski begitu ada 9% responden yang menyatakan bahwa seseorang dapat menjadi kaya karena korupsi. Sementara, sebanyak 58% responden menilai kemiskinan terjadi lantaran beragam faktor Bank Dunia juga mendapati 58% responden yang menganggap kemiskinan terjadi karena beragam faktor eksternal.

Faktor kedua adalah ketimpangan pasar kerja. Individu yang terperangkap dalam pekerjaan informal biasanya memiliki pemasukan yang rendah, sebab produktivitasnya rendah. Situasi ini menghambat mereka berkembang karena telah kalah dengan pekerja berketerampilan tinggi di bidang formal. Konsentrasi atau pemusatan kekayaan di segelintir orang menjadi faktor ketiga. Hanya 1%

rumah tangga terkaya di Indonesia mampu menguasai 50,3% kekayaan nasional.<sup>6</sup>

Faktor terakhir adalah masyarakat miskin cenderung tak siap menghadapi guncangan ekonomi. Biasanya kelompok ini akan paling terdampak ketika terjadi krisis ekonomi. Sebagai contoh, pandemi Covid-19 mengakibatkan krisis di Indonesia. Sehingga tak sedikit masyarakat yang kehilangan pekerjaannya. Akibatnya kelompok miskin mengalami kesulitan pemasukan dan sulit berinvestasi untuk kesehatan dan pendidikan.

Bank Dunia merekomendasikan tiga kebijakan yang dapat dilakukan pemerintah guna mempersempit ketimpangan ekonomi berdasarkan persepsi masyarakat. Kebijakan yang paling banyak didukung masyarakat adalah program perlindungan sosial. Program ini mendapat dukungan dari seluruh kelompok sosial.

Selanjutnya adalah pembukaan lapangan kerja. Bank Dunia menyebut pekerjaan yang tercipta harus berkualitas baik, bersifat formal dengan upah dan keuntungan yang layak. Harapannya, masyarakat rentan dan miskin dapat menikmati pekerjaan tersebut. Mereka juga disokong dengan pendidikan gratis, kredit Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), dan investasi infrastruktur.

---

<sup>6</sup> Muhammad Ahsan Ridhoi, *Ketimpangan Ekonomi Indonesia Ada di Berbagai Sisi* <https://katadata.co.id/muhammadrighoi/analisisdata/600ae1cc246d2/ketimpangan-ekonomi-indonesia-ada-di-berbagai-sisi>, diakses pada 27 Oktober 2020 Pukul 08:30 WIB

Kebijakan terakhir dan tak kalah penting adalah pemberantasan korupsi. Pernyataan ini banyak disuarakan oleh masyarakat berpendapatan dan berpendidikan tinggi. Karena, Hal ini bisa saja mengindikasikan kelompok tersebut lebih sering melihat atau mendengar korupsi skala besar. Tak hanya itu, bahkan secara personal terimbas praktik kolusi dan korupsi secara langsung.

Usaha pemerataan pendapatan yang dilakukan oleh pemerintah negara memiliki dampak yang besar terhadap kesejahteraan masyarakat.<sup>7</sup> Dengan kebijakan pemerataan pendapatan yang tepat sasaran, maka akan mengatasi masalah kesenjangan yang ada. Eka sastra berkata bahwa untuk mengatasi masalah kesenjangan maka harus ada kontribusi dari segala sektor dan aktor. Kebijakan yang harus difokuskan untuk menangani kesenjangan yaitu kebijakan fiskal redistributif, membangun pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, investasi pada perlindungan sosial, memperkuat kesetaraan dalam kesempatan, melawan praktik rente serta perubahan sistem politik.<sup>8</sup>

Model kebijakan fiskal dalam islam yaitu membentuk suatu pendistribusian ekonomi yang adil. Menurut Mannan, kebijakan fiskal dalam islam adalah pengelolaan anggaran belanja negara dengan prinsip distribusi kekayaan yang berimbang dan selalu memandang sama pada nilai-nilai material dan spiritual.<sup>9</sup> Kebijakan fiskal sendiri yaitu suatu proses dimana pemerintah

---

<sup>7</sup> Didit Purnomo, Distribusi Pendapatan di Indonesia Proses Pemerataan dan Pemiskinan, *JEP*, Vol 1, No. 1, tahun 2000, Hal. 47 diakses pada 29 Oktober 2020 Pukul 18.37 WIB

<sup>8</sup> Eka Sastra, *Kesenjangan Ekonomi*, (Jakarta: Mizan, 2017), Hal. 100

<sup>9</sup> Rasiyam, Kebijakan Fiskal Dalam Islam, *Jurnal Khatulistiwa Journal of Islamic Studies*, Vol 4, No 1, tahun 2014, Hal 89, diakses pada 31 Oktober 2020 Pukul 15:55 WIB

mengelola dana pendapatan negara yang diperoleh dari pajak, ZISWAF, dan usaha-usaha negara, yang digunakan untuk pembangunan negara.<sup>10</sup> Penyaluran dana zakat dan wakaf terhadap sector produktif seperti pemberdayaan masyarakat, ekonomi, dakwah, sosial masyarakat, pendidikan, kesehatan secara tidak langsung akan mendorong lebih berkualitasnya SDM.<sup>11</sup> Hal ini juga merupakan salah satu kebijakan redistribusi fiskal.

Dalam konsep ekonomi islam sendiri Zakat, wakaf, infaq serta sodaqoh merupakan sumber pendapatan islam.<sup>12</sup> Jika pemerintah melakukan pengelolaan zakat, wakaf, infaq dan shodaqoh ini dengan baik, besar kemungkinan pendapatan yang didapatkan dari pengelolaan zakat dan wakaf dapat memenuhi kebutuhan perbelanjaan negara serta dapat membantu masyarakat yang kurang mampu. Kebijakan distribusi zakat yang adil dan merata sangatlah diperlukan, karena hal ini dapat mengurangi beban ekonomi keluarga miskin sehingga kesejahteraan masyarakat dapat terbentuk. Selain itu dengan melakukan kebijakan distribusi dana ZISWAF yang tepat sasaran dapat membantu

---

<sup>10</sup> Ayief Fathurrahman, Kebijakan Fiskal Indonesia dalam Perspektif Ekonomi Islam: Studi Kasus Dalam Mengentaskan Kemiskinan, *Jurnal Ekonomi dan Studi Pembangunan*, Vol 13, No. 1, April 2012. Hal 73, diakses pada 14 November 2020 Pukul 13:24 WIB

<sup>11</sup> Naerul Edwin Kiky Aprianto, Kebijakan Distribusi dalam Pembangunan Ekonomi Islam. *Jurnal Al-Amwal*, Volume 8, No. 2, 2016 Hal. 447, diakses pada 14 November 2020 Pukul 13:45 WIB

<sup>12</sup>M. Zumair Aminudin, Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan, *Ijtihad*, Volume 13, No. 2, Desember 2013. hal 199-217, diakses pada 30 Oktober 2020 Pukul 07:00 WIB.

memenuhi kebutuhan dasar konsumsi masyarakat miskin yang menjadi tolak ukur dalam pengukuran kemiskinan.

Pendistribusian ZISWAF harus dilakukan oleh lembaga ataupun organisasi yang menaungi pengumpulan dana ZISWAF. Hal ini dikarenakan tanpa adanya lembaga ataupun organisasi yang mengelola dapat menyebabkan tidak terarahnya dana ataupun harta ZISWAF yang didistribusikan sehingga menyebabkan tidak terwujudnya keadilan dalam perekonomian<sup>13</sup>. Selain hal itu pemerintah dan masyarakat juga sangat mempengaruhi jalannya pendistribusian ini. Pemerintah sebagai pemegang kekuasaan harus mengkoordinir dengan membuat peraturan sebagai pengiring jalannya kebijakan yang telah ditentukan oleh lembaga dan masyarakatpun (muslim) juga harus sadar akan kewajibannya dalam mengeluarkan harta atau dana ZISWAFnya. Pada tabel 1.1 diketahui jumlah potensi zakat yang ada di Indonesia tahun 2019.

**Tabel 1.2**  
**Potensi Zakat di Indonesia tahun 2019**

No	Potensi Zakat	Jumlah
1	Zakat pertanian	19,79 Triliyun
2	Zakat uang	58,76 Triliyun
3	Zakat peternakan	9,51 Triliyun
4	Zakat perusahaan	6,71 Triliyun
5	Zakat penghasilan	136,07 Triliyun
	Jumlah	230,84 Triliyun

---

<sup>13</sup>Ruslan Abdul Ghofur Noor, Kebijakan Distribusi Ekonomi Islam dalam Membangun Keadilan Ekonomi Indonesia, *Jurnal Islamica*, Vol. 6, No. 2, tahun 2012, hal. 324, diakses pada 31 Oktober 2020 Pukul 15:45 WIB

Sumber : Baznas, diambil dari <https://www.baznasjabar.org>

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa potensi ZISWAF yang ada di Indonesia sangatlah besar. Dengan jumlah harta zakat yang sebanyak ini campur tangan pemerintah sangat diperlukan dalam pengelolanya. Hal tersebut bertujuan agar dana ZISWAF dapat terdistribusi dengan tepat sasaran. Namun, realitanya dengan potensi zakat yang sebesar itu, pengumpulan dana zakat di tahun 2019 hanya berjumlah 10 trilyun rupiah.<sup>14</sup> Hal ini sangat jauh dari perkiraan yang ada. Sehingga dari sini dapat dilihat bahwa harus ada penanganan lebih mendalam agar potensi ZISWAF yang ada di Indonesia dapat terkumpul dan terkelola dengan optimal. Tujuan dari pendistribusian ZISWAF tak lain adalah untuk mensejahterakan masyarakat terutama masyarakat dengan golongan menengah ke bawah.

Dalam mengatasi masalah kesenjangan pendapatan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas sangatlah penting. Pertumbuhan ekonomi yang berkualitas yaitu apabila pertumbuhan ekonomi diiringi dengan pemerataan distribusi pendapatan sehingga dapat menciptakan keadaan *full employment*. Ketika seluruh tenaga kerja dapat teroptimalkan dengan baik maka pertumbuhan ekonomi dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat.

Pertumbuhan ekonomi merupakan suatu hal yang sangat penting dalam sistem ekonomi. Di tengah pesatnya kemajuan industri, sains, dan teknologi

---

<sup>14</sup> Ahmad Setio Adi Nugroho dkk, *BAZNAS Statistic Zakat Nasional 2019*. (Jakarta: BAZNAS Sub Devisi Pelaporan, 2020), Hal. 21

diharapkan mampu memberikan solusi dalam permasalahan perekonomian dan membawa perekonomian negara-negara kearah yang lebih baik. Namun, kenyataanya hal ini belum mampu membawa perubahan yang signifikan terhadap permasalahan-permasalahan yang terjadi. Kemiskinan, kesenjangan, pengangguran masih banyak ditemui diberbagai wilayah. Hal ini diperburuk dengan kegiatan ekonomi yang bertentangan dengan ajaran agama islam, dimana korupsi, monopoli pasar, riba dan malpraktik lainnya masih banyak terjadi di lingkungan sekitar kita. Dari hal ini dapat dikatakan bahwa terjadinya masalah perekonomian yang ada tak lain karena ulah tangan manusia sendiri.

Dari beberapa ulasan masalah di atas kita ketahui bahwa peran pemerintah dan masyarakat dalam menjalankan kegiatan perekonomian dengan baik, jujur dan benar sangatlah penting. Penelitian ini dilakukan dengan alasan untuk mengetahui seberapa efektif pertumbuhan nilai PDB negara dan penyaluran dana ZISWAF dapat mengurangi kesenjangan pendapatan. Sehingga kita bisa mengetahui dan menentukan kebijakan yang diambil dalam melakukan kegiatan perekonomian khususnya dalam mengurangi tingkat kesenjangan pendapatan dan membentuk masyarakat yang sejahtera.

## **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan dari latar belakang di atas, peneliti menumukan masalah sebagai berikut:

1. Kesenjangan sosial ekonomi merupakan masalah setiap negara berkembang.

2. Pertumbuhan ekonomi dari tahun 2011-2019 mengalami fluktuatif akibat faktor ekonomi global. Dapatkah pertumbuhan ekonomi yang berfluktuatif menurunkan kesenjangan pendapatan di Indonesia?.
3. Potensi zakat yang ada di Indonesia tahun 2019 sebesar 230,84 Triliyun, namun ternyata pada pengumpulannya hanya berjumlah 10 Triliyun.

### **C. Rumusan Masalah**

Dari latar belakang yang telah dijabarkan oleh penulis, maka rumusan masalah yang dapat diambil yaitu:

1. Apakah ZISWAF dan pertumbuhan ekonomi berpengaruh secara persial terhadap kesenjangan pendapatan di Indonesia tahun 2011-2019?
2. Apakah ZISWAF dan pertumbuhan ekonomi berpengaruh secara simultan terhadap kesenjangan pendapatan di Indonesia tahun 2011-2019?

### **D. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini memiliki beberapa tujuan:

1. Untuk mengetahui apakah ZISWAF dan pertumbuhan ekonomi berpengaruh secara persial terhadap kesenjangan pendapatan Indonesia tahun 2011-2019
2. Untuk mengetahui apakah ZISWAF dan pertumbuhan ekonomi berpengaruh secara simultan terhadap kesenjangan pendapatan Indonesia tahun 2011-2019.

## **E. Kegunaan Penelitian**

Dengan adanya penelitian ini semoga memberikan kemanfaatan kepada pihak – pihak yang membutuhkan diantaranya:

### **1. Kegunaan Teoritis**

Penelitian ini semoga dapat menjadi tambahan wawasan juga pembelajaran bagi orang-orang yang membutuhkan. Khususnya bagi mahasiswa dan mahasiswi yang sedang menempuh pendidikan ekonomi islam, praktisi juga masyarakat umum yang berkecimpung dalam dunia ekonomi islam.

### **2. Kegunaan Praktis**

#### **a. Bagi Penulis**

Penelitian yang dilakukan diharapkan mampu menambah kefahaman penulis tentang system juga program-program negara terhadap pengembangan juga pengaplikasian system ekonomi islam. Selain itu dengan melakukan penelitian ini diharapkan dapat memperluas wawasan ilmu serta sarana pengamalan ilmu ekonomi islam yang selama ini telah di dipelajari dalam islam.

#### **b. Bagi Universitas**

Harapan penulis terhadap penelitian yang dilakukan yaitu semoga penelitian yang dilakukan dapat bermanfaat bagi mahasiswa yang menempuh pendidikan ekonomi islam, juga sebagai salah satu bentuk kontribusi penulis dalam bidang keilmuan ekonomi bagi universitas.

#### **c. Bagi Negara**

Dengan telah dilakukannya penelitian ini semoga dapat dijadikan salah satu bahan pertimbangan dalam melaksanakan kebijakan distribusi pendapatan, khususnya pendapatan yang didapatkan dari ZISWAF guna meningkatkan produktifitas masyarakat maupun ekonomi negara.

## **F. Ruang Lingkup Dan Keterbatasan Penelitian**

### **1. Ruang lingkup**

Ruang lingkup penelitian merupakan ketentuan yang diambil oleh peneliti sebagai batasan dalam melakukan penelitiannya. Hal ini dilakukan agar saat menjalankan penelitian hal-hal yang diteliti tidak keluar dari ruang lingkup yang ada. Sehingga penelitian yang dilakukan oleh peneliti dapat berjalan dengan lancar. Sedangkan ketentuan masalah yang ditetapkan merupakan batasan masalah yang akan diteliti. Hal ini dilakukan dengan tujuan agar tidak salah dalam melakukan uji penelitian dari factor-faktor yang telah dipilih dari hasil pembatasan masalah. Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan model kausalitas. Tujuan dari penelitian kausalitas yaitu untuk mengetahui pengaruh variabel independent terhadap variabel dependet.

### **2. Keterbatasan penelitian**

Ada beberapa keterbatasan yang terjadi dalam menjalankan penelitian, diantaranya yaitu

- a. Keterbatasannya ruang gerak penelitian, karena virus corona yang semakin menyebar.
- b. Kegiatan penelitian yang dilakukan relatif singkat.

## G. Penegasan Istilah

### 1. Definisi Konseptual

- a. Gini rasio merupakan alat ukur untuk mengetahui ketidak merataan suatu distribusi.<sup>15</sup>
- b. ZISWAF merupakan singkatan dari zakat, wakaf, infaq, dan shodaqoh. Membayar zakat hukumnya wajib bagi setiap muslim dan mengeluarkan wakaf, infaq serta shodaqoh hukumnya sunnah.
- c. Kesenjangan pendapatan merupakan suatu fenomena dimana terdapat ketidakseimbangan di dalam masyarakat yang mengakibatkan terjadinya perbedaan yang mencolok dalam suatu wilayah.<sup>16</sup>
- d. Pertumbuhan ekonomi fenomena dimana masyarakat, politik, struktur ekonomi berubah menjadi lebih baik dari pada masa sebelumnya.<sup>17</sup>
- e. Produk domestic bruto (PDB) merupakan suatu indicator ekonomi yang menjelaskan tentang pendapatan suatu wilayah dalam kurun waktu tertentu.<sup>18</sup>

---

<sup>15</sup> Sugiarto, Jangkung Handayono Mulyo, dan Rosalina Nataliya Selekty, Kemiskinan dan Ketimpangan Pendapatan Rumah Tangga di Kabupaten Bojonegoro, *Agro Ekonomi*, Vol 26, No. 2, Tahun 2015, Hal. 117. diakses pada 14 November 2020 Pukul 14:32 WIB

<sup>16</sup> Ibrahim, *Potret Pertumbuhan...*, Hal.6314

<sup>17</sup> Hari Apriansyah dan Fachrizal Bachri, Analisis Hubungan Kausalitas Antara Investasi Pemerintah dengan Pertumbuhan Ekonomi Kota Palembang, *Jurnal ekonomi Pembangunan*, Ol. 4 No.2/2006, Hal. 80 diakses pada 15 November 2020 Pukul 07:14 WIB

<sup>18</sup> Lutfi Fauziana Dkk, Keterkaitan Investasi Modal Terhadap GDP Indonesia, *Economics Development Analysis Journal*, Vol 3, No. 2, 2014, hal. 374 diakses pada 15 November 2020 Pukul 07:31 WIB

- f. Kebijakan fiscal strategi atau langkah-langkah pemerintah untuk memberikan pengaruh terhadap pengeluaran agregat perekonomian dengan cara membuat perubahan pada bidang perpajakan dan pengeluaran pemerintah.<sup>19</sup>

## 2. Definisi Oprasional

- a. Zakat, wakaf, infaq dan shodaqoh (X1)

Zakat merupakan harta seorang muslim yang wajib dikeluarkan pada saat tertentu dan dalam jumlah tertentu. Menurut para ulama zakat dibagi menjadi dua jenis, yang pertama yaitu zakat fitrah dan yang kedua yaitu zakat mal. Zakat fitrah hukumnya wajib bagi setiap orang, setiap bulan ramadahan seluruh umat muslim wajib hukumnya untuk mengeluarkan zakat fitrah ini. Sedangkan zakat mal dikeluarkan setiap satu tahun sekali dan ketika harta seorang muslim tersebut sudah mencapai nisab. Nisab dapat diartikan sebagai jumlah yang telah ditentukan oleh syariat agama sehingga mewajibkan pemilik harta untuk mengeluarkan zakat dari harta tersebut. Dalam mengeluarkan zakat islam telah mengatur tata cara dan jumlah harta yang akan dikeluarkan. Sehingga kita tidak bisa sembarangan dalam melakukan zakat.karena zakat merupakan ibadah yang bersifat wajib dan apabila kita tidk memenuhi aturan dan tata caranya maka ibadah kita tidak sah.

---

<sup>19</sup> Sadono Sukirno, *Makro Ekonomi Teori Pengantar*, (Jakarta, PT RajaGrafindo Persada: 2016), hal.24

Wakaf, infaq dan shodaqoh merupakan harta yang dikeluarkan oleh seorang muslim dan bersifat suka rela. Dalam mengeluarkan wakaf, infaq, dan shodaqoh tidak dibatasi jumlah harta yang akan dikeluarkan maupun waktu dalam mengeluarkan harta tersebut. Sehingga apabila kita melakukannya mendapat kan pahala, dan apabila tidak melakukannya tidak mendapatkan dosa.

b. Pertumbuhan ekonomi (X2)

Rostow menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi merupakan fenomena dimana masyarakat, politik, struktur ekonomi berubah menjadi lebih baik dari pada masa sebelumnya.<sup>20</sup>

Sedangkan Prof. Simon Kuznets berpendapat bahwa ketika suatu negara dapat memenuhi permintaan kebutuhan masyarakatnya dengan ditunjang oleh teknologi pendukung yang canggih sehingga terjadi stabilitas perekonomian hal ini disebut sebagai pertumbuhan ekonomi.<sup>21</sup>

Menurut Sukirno pertumbuhan ekonomi merupakan suatu keadaan dimana bertambah banyaknya produksi barang dan jasa sehingga berefek pada kesejahteraan masyarakat suatu negara.<sup>22</sup>

Kesimpulan dari berbagai pendapat tersebut yaitu Pertumbuhan ekonomi merupakan suatu proses berubahnya keadaan ekonomi suatu

---

<sup>20</sup> Apriansyah, *Analisis Hubungan....*, Hal. 80

<sup>21</sup> Abdul Aziz dkk, Faktor Faktor Yang Mempengaruhi Kemiskinan di Kabupaten Kutai Kartanegaragamal, *Jurnal Ekonomi Keuangan, Dan Manajemen*, Vol 12, No. 1, tahun 2016, hal 34 diakses pada 15 November 2020 Pukul 07:52 WIB

<sup>22</sup> Sukirno, *Makro Ekonomi...*, hal.422

negara kearah yang lebih baik. Hal ini merupakan suatu sasaran dilakukannya regulasi perekonomian oleh negara. Pertumbuhan ekonomi juga dapat dikatakan suatu proses mengukur atau menerangkan prestasi dari perkembangan ekonomi suatu negara dalam beberapa kurun waktu tertentu.

c. Kesenjangan Pendapatan (Y)

Kesenjangan pendapatan adalah ketidakseimbangannya tingkat ekonomi suatu masyarakat dalam suatu kurun waktu tertentu. Hal ini terjadi kerana tidak meratanya distribusi pendapatan juga kurang berkualitاسnya sumber daya manusia suatu negara sehingga menimbulkan pengangguran dan memicu terjadinya kesenjangan pendapatan.<sup>23</sup>

Ada banyak factor yang menyebabkan kesenjangan pendapatan di Indonesia diantaranya yaitu biaya pendidikan yang mahal, pembangunan infrastruktur yang kurang merata, banyaknya pengangguran dan masih banyak lagi. Peran dan kebijakan pemerintah sangat dibutuhkan, demi terciptanya perekonomian yang stabil.

Kesenjangan pendapatan merupakan masalah perekonomian yang perlu diberikan perhatian khusus. Karena melihat dari konsep ekonomi Pancasila yang di terapkan di negara Indonesia tidak adil rasanya jika

---

<sup>23</sup> Farida Nur dan Eggy Fajar Andalas, Representasi Kesenjangan Social Ekonomi Masyarakat Pesisir Dengan Perkotaan. *Jurnal Kembara*, Vol 5, No 1, tahun 2019, hal.78 diakses pada 15 November 2020 Pukul 08:14 WIB

masih banyak masyarakat yang kekurangan, tapi ada kelompok-kelompok yang bergaya hidup hedonis dalam lingkup suatu wilayah. Peraturan pemerintah serta langkah kebijakan-kebijakan perekonomian yang solutif sangat diperlukan. Melihat masih banyaknya kalangan-kalangan menengah kebawah yang kekurangan bahkan dalam hal pendidikan sekalipun.

Jika dilihat dari segi pendidikan, kualitas pendidikan Indonesia cenderung masih banyak terjadi ketimpangan pada setiap daerahnya. Kita ambil contoh pendidikan di desa ataupun pedalaman masih sangat memprihatinkan, kurangnya tenaga pendidik dan fasilitas pendidikan yang kurang mumpuni menjadi salah satu factor kurangnya mutu pelajar. Hal ini sangat jauh beda dengan pendidikan di perkotaan. Dapat dikita lihat sendiri bahwa kebanyakan sekolah-sekolah yang bergengsi berada di perkotaan yang rata-rata masyarakatnya tergolong dalam masyarakat menengah keatas. Masalah kualitas pendidikan sangatlah penting untuk di bahas. Karena dengan pendidikan yang berkualitas akan menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas pula. Sumber daya manusia yang berkualitas akan mendorong turunnya angka pengangguran dan kemiskinan karena manusianya bisa mengelola dan mengembangkan potensi-potensi ekonomi yang ada.

## **H. Sistematika Pembahasan**

### **BAB I: PENDAHULUAN**

Bab ini memuat pendahuluan yang berisikan (a) latar belakang masalah, (b) identifikasi masalah, (c) rumusan masalah, (d) tujuan penelitian, (e) kegunaan penelitian, (f) ruang lingkup dan keterbatasan penelitian, (g) penegasan istilah, serta (h) sistematika penulisan skripsi. Pada isi Bab ini dimaksudkan agar para pembaca dapat mengetahui konteks penelitian yang dilakukan.

## BAB II: LANDASAN TEORI

Hal yang dikemukakan dalam Bab II ini ialah Landasan Teori, yang memuat tentang teori kebijakan fiskal, teori pertumbuhan perekonomian, ziswaf dan teori kesenjangan pendapatan. Selain itu, didalamnya akan dibahas mengenai beberapa penelitian yang relevan dengan penelitian terkait.

## BAB III: METODE PENELITIAN

Dalam Bab ini memuat metode penelitian yang digunakan, berisi tentang (a) pendekatan dan jenis penelitian, (b) sumber data, variabel, dan skala pengukuran, (c) teknik pengumpulan data, (d) serta metode analisis data.

BAB IV: Pada Bab ini penulis memaparkan hasil atas penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, dimana di dalamnya memuat deskripsi data dan juga pengujian terhadap hipotesis.

## BAB V: PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

Pada Bab ini berisikan pembahasan yang terkait dengan masalah-masalah yang telah dirumuskan, yang dibuktikan dengan pengujian atas hipotesis yang telah di jelaskan di BAB II

## BAB VI: PENUTUP

Bab ini berisikan tentang kesimpulan atas penelitian yang dilakukan serta saran-saran atas penelitian yang telah dilakukan.